

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Profil Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi yang memiliki luas wilayah administrasi terkecil kedua di Republik Indonesia, setelah Provinsi DKI Jakarta. Luas wilayah administrasi DIY sebesar 3.185,80 km² atau 0,17 persen dari luas daratan Indonesia. Secara geografis, letak wilayah DIY berada di bagian tengah Pulau Jawa tepatnya di sisi selatan. Seluruh wilayah daratan DIY dikelilingi oleh wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah mulai dari bagian utara, timur, dan barat. Sementara, di bagian selatan dikelilingi oleh Samudra Indonesia. Posisi astronomi DIY terbentang antara 7⁰.33'-8⁰.12' Lintang Selatan dan 110⁰.00'-110⁰.50' Bujur Timur. Posisi ini terletak di selatan garis Khatulistiwa, sehingga termasuk daerah yang beriklim tropis atau memiliki dua musim. Karakteristik cuaca wilayah DIY secara umum bertemperatur tinggi atau memiliki rata-rata suhu udara yang panas serta memiliki kelembaban udara dan curah hujan yang cukup tinggi.

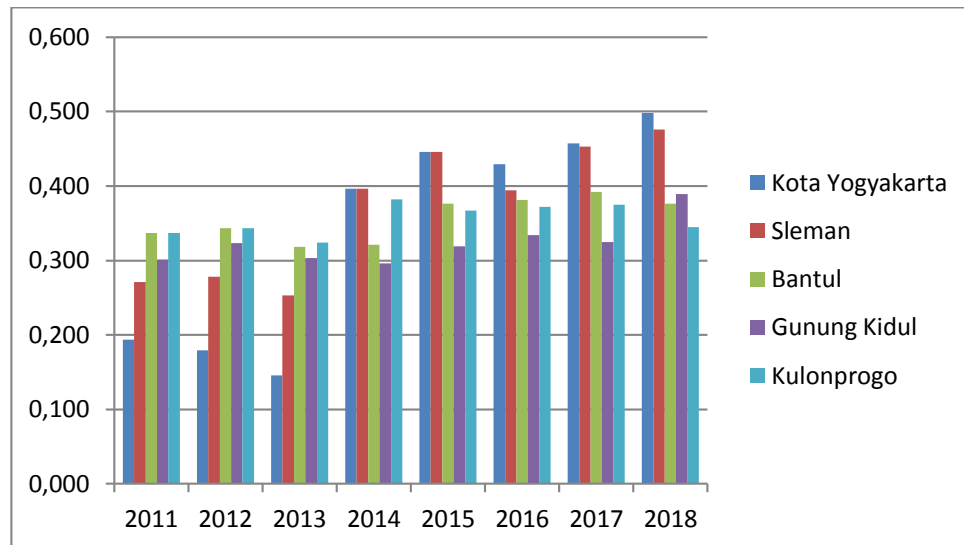
DIY terdiri dari empat kabupaten dan satu kotamadya, yang terbagi menjadi 78 kecamatan, dan 438 desa/kelurahan. Kabupaten dengan wilayah terluas adalah Gunungkidul. Berikutnya adalah Kulonprogo dan Sleman. Kemudian Bantul dan terakhir adalah Kota Yogyakarta sebagai Ibukota Provinsi sekaligus daerah kabupaten/kota dengan luas wilayah terkecil. Menurut data BPS 2014 melalui sensus

penduduk pada tahun 2010, DIY dihuni dengan total penduduk sebesar 3.475.491 jiwa dengan rincian berdasarkan jenis kelamin 50,57 persen perempuan dan 49,43 persen laki-laki. Jumlah penduduk terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sementara itu pada kuartal kedua tahun 2017 jumlah penduduk yang menghuni DIY adalah sebanyak 3.762.167 jiwa. Sementara itu untuk sektor-sektor yang menjadi penguat ekonomi di DIY masih didukung oleh 5 sektor ekonomi yaitu, industri pengolahan, konstruksi, penyedia akomodasi dan makan-minum, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dan perdagangan.

B. Kondisi Gini Ratio, PDRB Per Kapita, IPM, PAD, dan DAU di D.I Yogyakarta

1. Gini Ratio

Ketimpangan pendapatan antar daerah dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi buku tahunan masing-masing Kabupaten/Kota D.I Yogyakarta. Ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan setiap tahun dan hanya Kabupaten Sleman yang mengalami penurunan. Ketimpangan pendapatan tertinggi diperoleh di Kota Yogyakarta setiap tahunnya dengan nilai Indeks lebih dari 0,35 atau dalam arti lain ketimpangan di Kota Yogyakarta kategori sedang.



Sumber : Data Diolah, 2019

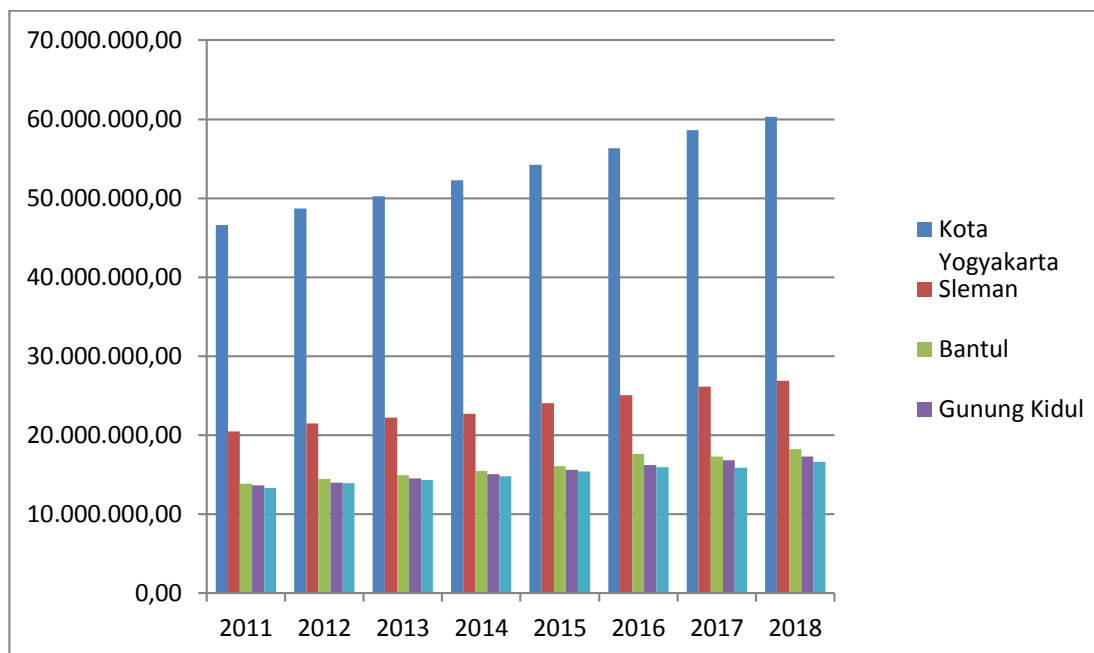
GAMBAR 4.1

Indes Gini Kabupaten/ Kota DIY 2011-2018 (persen)

2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita dihitung dari rasio antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah secara kasar. Perkembangan nilai PDRB per kapita DIY selama periode 2010-2018 menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. PDRB per kapita DIY atas dasar harga berlaku tahun 2010 tercatat mencapai Rp18,65 juta dan secara nominal terus meningkat menjadi Rp34,15 juta pada tahun 2018. Namun, peningkatan tersebut masih dipengaruhi oleh faktor perubahan harga atau inflasi. Secara riil atau atas dasar harga konstan 2010, PDRB per kapita meningkat dari Rp18,65 juta di tahun 2010 menjadi Rp25,78 juta di tahun 2018 atau rata-rata tumbuh 4,13 persen per tahun. Secara kasar,

peningkatan level tersebut menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk DIY secara rata-rata yang semakin membaik dengan asumsi faktor produksi yang menggerakkan perekonomian dimiliki oleh penduduk/residen DIY. Pertumbuhan PDRB per kapita riil memiliki pola yang searah dengan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, level pertumbuhan PDRB per kapita riil tercatat lebih rendah karena dikoreksi oleh laju pertumbuhan penduduk DIY setiap tahun.



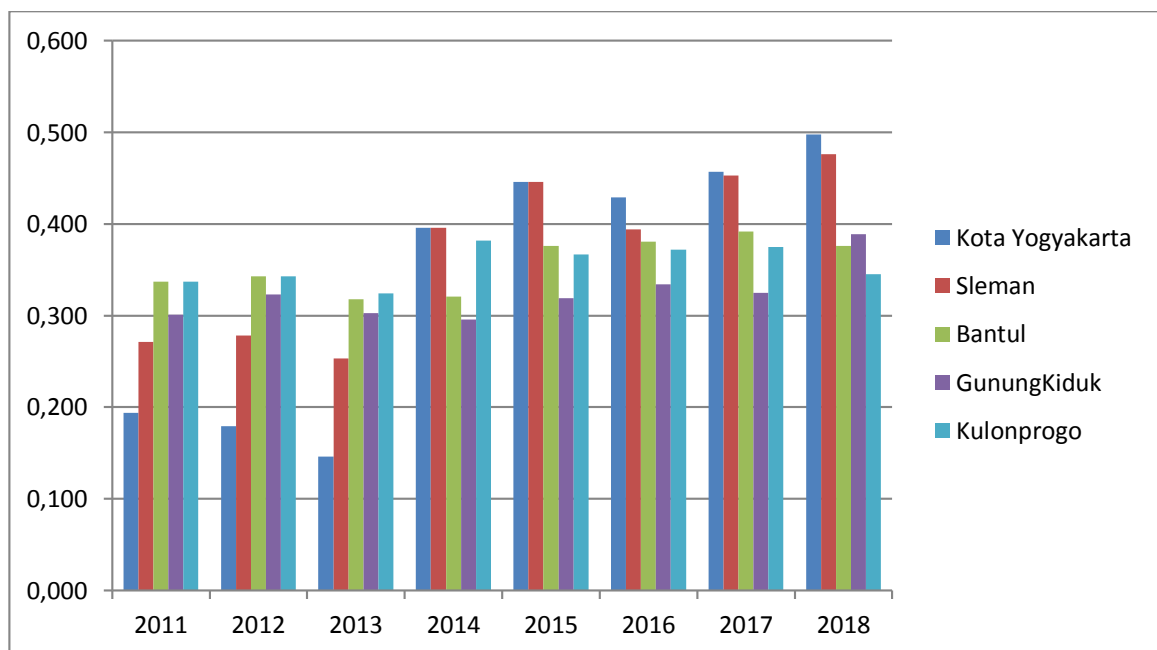
Sumber : Data Diolah, 2019

GAMBAR 4.2
PDRB Per Kapita Kabupaten/ Kota DIY 2011-2018 (rupiah)

3. IPM

Kualitas pembangunan manusia menurut kabupaten/kota di DIY selama periode 2010-2018 menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Hal ini terlihat dari

capaian nilai IPM semua kabupaten/kota yang secara bertahap semakin meningkat. Secara level, capaian pembangunan manusia yang tertinggi dalam satu dekade terakhir tercatat di Kota Yogyakarta dan diikuti oleh Kabupaten Sleman. Capaian tertinggi berikutnya secara berturut-turut adalah Kabupaten Bantul, dan Kulon Progo. Sementara, capaian level pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul selama beberapa terakhir tercatat selalu berada pada posisi terendah di antara lima kabupaten/kota di DIY.



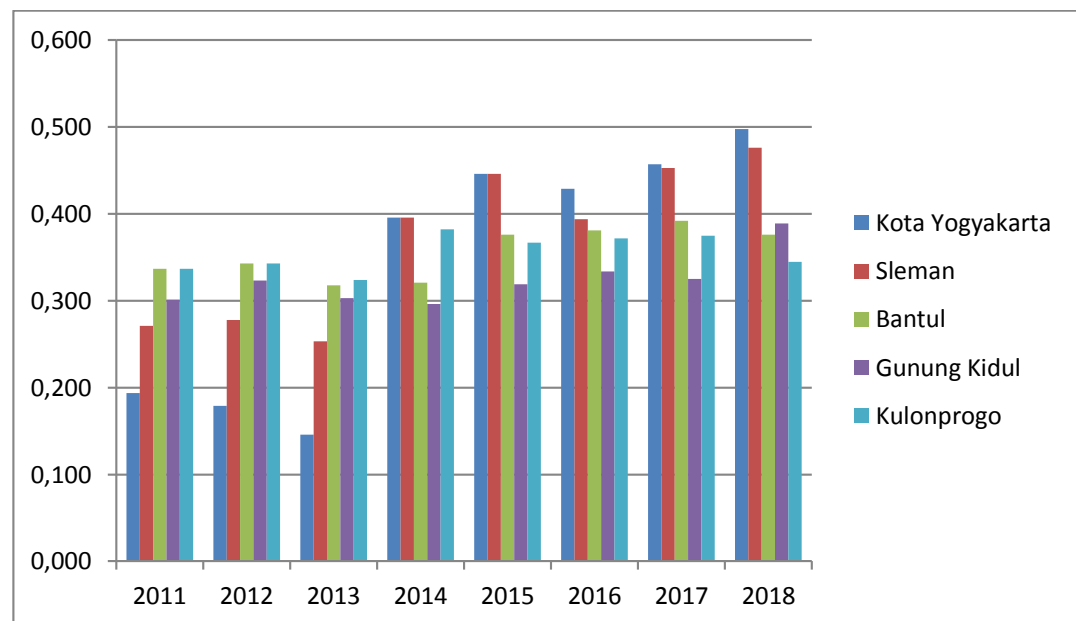
Sumber : Data Diolah, 2019

GAMBAR 4.3
IPM Kabupaten/ Kota DIY 2011- 2019 (persen)

Level IPM Kota Yogyakarta menempati peringkat tertinggi secara nasional di atas Kota Jakarta Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Secara umum, pencapaian

angka IPM tersebut menggambarkan kualitas pembangunan manusia di Kota Yogyakarta yang secara relatif lebih baik dibandingkan dengan semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 29 kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori IPM sangat tinggi ($IPM > 80$).

4. PAD



Sumber : Data Diolah, 2019

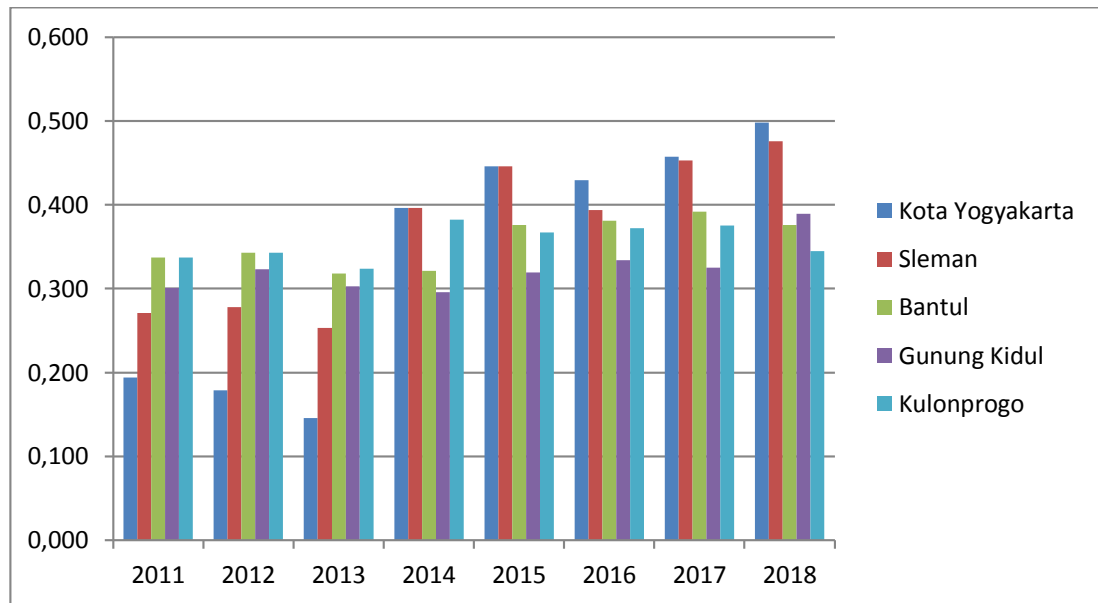
GAMBAR 4.4
PAD Kabupaten / Kota DIY tahun 2011-2018 (ribu)

Berdasarkan gambar 4.4 menunjukkan bahwa PAD di D.I Yogyakarta pada tahun 2018, Kota Yogyakarta menempati posisi paling tinggi diantara 5 Kabupaten lainnya dalam penganggaran. Kemudian Kulonprogo pada tahun 2018 dibanding dengan 2017 PAD mengalami penurunan. Berbeda dengan Kabupaten Sleman dan Gunung

Kidul disbanding tahun 2017, kedua kabupaten tersebut mengalami kenaikan tingkat PAD yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp.94,924 Milyar, sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp.80,802 Milyar, turun sebesar Rp.14,121 Milyar atau 14.88 persen

5. DAU

DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAU dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. DAU Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1,314 Trilyun.



Sumber : Data Diolah, 2019

Gambar 4.5
DAU Kabupaten/ Kota DIY tahun 2011-2018 (ribu)

Berdasarkan Gambar 4.5 dari tahun ke tahun mulai 2011-2018 DAU di 5 Kabupaten / Kota di D.I Yogyakarta secara terus menerus mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2013, Kota Yogyakarta menjadi Kabupaten yang paling rendah menerima DAU. Namun pada tahun 2018 Kota Yogyakarta menjadi Kabupaten yang paling tinggi menerima DAU , dan Gunungkidul adalah Kabupaten yang menerima DAU rendah diantara 4 Kabupaten lainnya.